



**DPMPTSP**  
Provinsi Kalimantan Barat

# LAPORAN KINERJA Tahun 2023

**DPMPTSP**  
**Provinsi Kalimantan Barat**

Jl. A. Yani Gedung Pelayanan Terpadu Lantai 2  
Komp. Kantor Gubernur Kalimantan Barat

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Barat dapat terlaksana dan tersusun dengan baik. Laporan Kinerja disusun sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP.

Melalui Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dalam peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja DPMPTSP Prov. Kalbar, sehingga secara langsung dapat membantu pimpinan dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun program dan kegiatan di tahun berikutnya. Namun demikian kami menyadari masih terdapat kelemahan-kelemahan di dalam laporan ini yang perlu terus ditingkatkan sebagai upaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Pada kesempatan ini juga kami ingin menyampaikan penghargaan yang diterima oleh DPMPTSP pada Tahun 2023 sebagai hasil dalam pencapaian kinerja, antara lain sebagai berikut:

1. Penghargaan dari Gubernur Kalimantan Barat atas Prestasinya Memperoleh Top 10 SIVABLIK dalam Pelaksanaan Kompetensi Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 yang Dianugrahkan kepada Inovasi “PERIUK (Pelayanan Responsif Izin Usaha Mikro Kecil)”;
2. Penghargaan dari Gubernur Kalimantan Barat atas Keberhasilan Pencapaian 100% dalam Pelaksanaan Pemenuhan Indikator dan Sub Indikator Area Intervensi Perizinan *Monitoring Center For Prevention* (MCP) Aksi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2022;
3. Penghargaan dari Gubernur Kalimantan Barat atas Peraih Hasil Evaluasi penyelenggaraan Pelayanan Publik berupa Indeks Pelayanan Publik (IIP) dari Kementerian PAN dan RB Tahun 2022 dengan Nilai 4,46 atau Predikat A (Sangat Baik) dan Penilaian Kepatuhan Standar pelayanan Publik dari Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2022 dengan Nilai 87,57 atau Predikat B (Kualitas Tinggi);
4. Penghargaan dari Pj. Gubernur Kalimantan Barat sebagai Perangkat Daerah yang Berperan Aktif dan telah Menyesuaikan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan Semester II Tahun Anggaran 2023 dengan Presentase 100%;

5. Penghargaan dari Pj. Gubernur Kalimantan Barat atas Peraihan Memperoleh Peringkat 4 dalam Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023 dengan Nilai Memuaskan atau Predikat A.

Dengan tulus kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsih baik kritik, saran ataupun masukan yang berharga dalam menyelesaikan Laporan Kinerja Tahunan ini. Harapan kami kiranya Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan khususnya bagi ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat untuk selalu meningkatkan kinerja dalam memberikan layanan kepada Masyarakat.

Pontianak, Januari 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Kalimantan Barat,



Hendra S.Sos  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19680925 198908 1 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I      PENDAHULUAN.....	1
A. GAMBARAN UMUM .....	1
B. PERMASALAHAN UTAMA (ISU STRATEGIS) .....	8
BAB II     PERENCANAAN KERJA.....	9
A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) .....	9
B. PERJANJIAN KINERJA.....	10
BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA .....	12
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....	12
B. REALISASI ANGGARAN.....	39
BAB IV    PENUTUP .....	43
LAMPIRAN	

## BAB I PENDAHULUAN

### A. GAMBARAN UMUM

#### 1. Pendahuluan

Sebagai upaya peningkatan dalam pelaksanaan tata pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab menuju terwujudnya Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Lokal Yang Baik (Good Local Governance) maka diperlukan suatu bentuk pertanggung jawaban dalam bentuk Laporan Kinerja Tahunan.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan 2022 mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP. Berdasarkan kebijakan tersebut maka Dinas Penanaman Modal dan Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan bagian dari Perangkat Daerah (PD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah membuat Rencana Strategis (RENSTRA) 2018-2023 dan Laporan Kinerja Tahunan dalam bentuk perhitungan APBD berikut penilaian kinerja berdasarkan tolak ukur Renstra.

DPMPTSP Prov. Kalbar dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 41 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Cara Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kalimantan Barat. Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat di atas disebutkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas *"membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan"*.

Kegiatan penanaman modal yang merupakan salah satu ujung tombak dalam menggerakkan roda perekonomian dan pembangunan, dan terutama merupakan salah satu jalan menyerap tenaga kerja, untuk itu perlu ditingkatkan pelaksanaannya, baik dari segi perencanaan, promosi, kerjasama, pelayanan, serta dalam hal pengendaliannya. Kesemua ini merupakan mata rantai yang tidak bisa terpisahkan satu sama lain dan memiliki keterkaitan yang sangat erat untuk menunjukkan realisasi investasi di suatu daerah.

Persoalan ketersediaan infrastruktur menjadi salah satu penyebab kurangnya minat investor menanamkan modal. Seperti sektor primer dengan bidang usaha perkebunan masih mendominasi bidang usaha yang paling diminati karena infrastruktur

relatif tersedia. Sedangkan untuk sektor sekunder perkembangannya belum signifikan karena diperlukan infrastruktur (jalan, listrik dan pelabuhan) yang memadai. Di samping itu, pengembangan kerjasama antar pemerintah, swasta dan masyarakat, termasuk dalam pengelolaan promosi investasi perlu mendapat penguatan dalam upaya peningkatan realisasi investasi. Peningkatan investasi memang memerlukan penguatan kerjasama antar pemerintah, swasta dan masyarakat termasuk pengelolaan promosi investasi.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan kinerja perekonomian daerah, strategi dalam urusan penanaman modal ditempuh melalui peningkatan investasi serta menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan penanaman investasi dan dunia usaha. Disamping itu, bagaimana mendorong peningkatan masuknya arus investasi yang mengarah kepada upaya kegiatan di bidang pengembangan industri pengolahan yang berbasis sumberdaya alam.

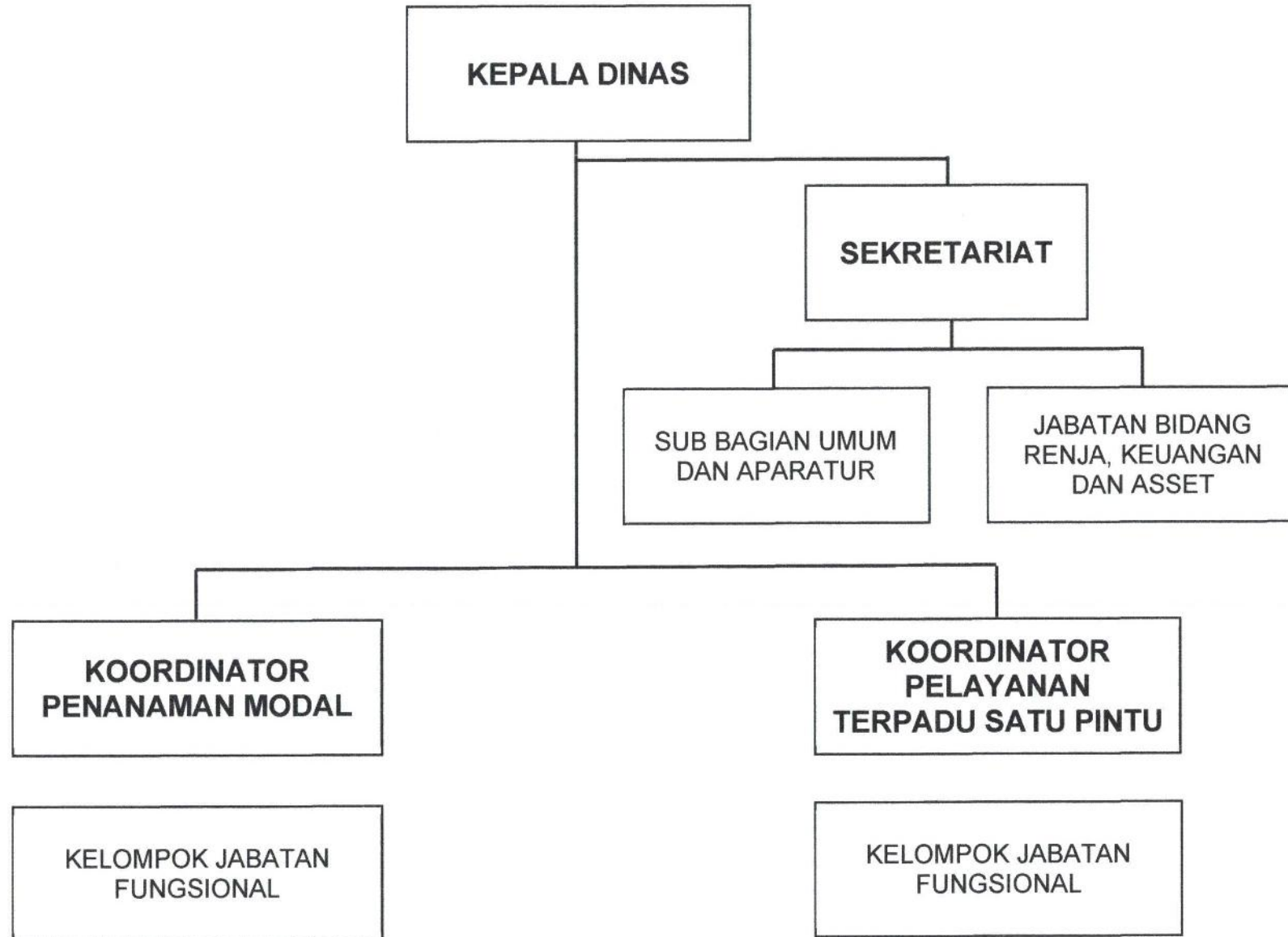
Peningkatan pertumbuhan realisasi investasi ini merupakan kepercayaan Penanam Modal untuk melakukan investasi di Kalimantan Barat yang tidak terlepas dari peran serta seluruh komponen masyarakat untuk menciptakan rasa aman dan penyebarluasan informasi berbagai kegiatan investasi di Kalimantan Barat, sehingga perbaikan kebijakan, penciptaan iklim investasi yang lebih kondusif, perbaikan pelayanan penanaman modal baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota dapat direspon positif oleh kalangan dunia usaha dalam dan luar negeri.

## **2. Susunan Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 41 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat, maka susunan Struktur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat dapat dilihat sebagai berikut:

- 1) Kepala Dinas;
- 2) Sekretariat, yang dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi 1 Sub Bagian dan Jabatan Bidang Rencana Kerja, Keuangan dan Asset yaitu:
  - a. Sub Bagian Umum dan Aparatur;
  - b. Jabatan Bidang Rencana kerja, Keuangan dan Asset
- 3) Urusan Penanaman Modal yang dipimpin oleh Koordinator yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- 4) Urusan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dipimpin oleh Koordinator yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

## STRUKTUR ORGANISASI DPMPSTP PROV. KALBAR



### 3. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 41 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat disebutkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas “*membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan*”. Untuk melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud di atas, DPMPTSP Prov. Kalbar menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. perumusan program kerja di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
2. perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
3. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
4. pengoordinasian dan pembinaan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
5. penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
6. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
7. pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan DPMPTSP;
8. pelaksanaan administrasi di lingkungan DPMPTSP; dan
9. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 4. Sumber Daya Aparatur

Jumlah personil yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat per Desember 2023 berjumlah 46 orang, dengan susunan sebagai berikut :

- Eselon II	Berjumlah	1 (satu) orang
- Eselon III	Berjumlah	1 (satu) orang
- Eselon IV	Berjumlah	1 (satu) orang
- Fungsional Tertentu	Berjumlah	22 (dua puluh dua) orang
- Staf non eselon	Berjumlah	21 (dua puluh satu) orang



**JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN**

NO	ESELON/ NON ESELON	GOLONGAN																Jumlah
		GOL I				GOL II				GOL III				GOL IV				
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	
1	Eselon II																1	1
2	Eselon III													1				1
3	Eselon IV												1					1
4	Non eselon					1	1	5	15	5	8	3	5					
<b>JUMLAH</b>						1	1	5	15	5	9	4	5				1	46

**JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN**

NO	ESELON/ NON ESELON	TINGKAT PENDIDIKAN										JUMLAH
		SD	SMP	SMA	D1	D2	D3	D4	S1	S2		
1	Eselon II									1		
2	Eselon III										1	
3	Eselon IV									1		
4	Non Eselon			7				2		24	11	
<b>JUMLAH</b>				7				2		26	12	46

**JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN JENIS KELAMIN (PEREMPUAN)**

NO	ESELON/ NON ESELON	JUMLAH
1	Eselon II	
2	Eselon III	1
3	Eselon IV	1
4	Non Eselon	21
<b>JUMLAH</b>		23

**JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN JENIS KELAMIN (LAKI-LAKI)**

NO	ESELON/ NON ESELON	JUMLAH
1	Eselon II	1
2	Eselon III	
3	Eselon IV	
4	Non Eselon	22
<b>JUMLAH</b>		23

**5. Sumber Daya Keuangan**

Alokasi anggaran murni tahun 2023 DPMPSTSP Prov. Kalbar sebesar Rp. 12.976.679.820 dengan pembagian belanja operasi sebesar Rp. 12.870.246.737 dan belanja modal sebesar Rp. 106.433.083. Pada penyempurnaan pergeseran anggaran Tahun 2023 menjadi Rp. 12.789.420.137,- berkurang anggaran sebesar Rp.187.259.683,-

kemudian pada perubahan anggaran Tahun 2023 menjadi Rp.12.019.968.846,- berkurang sebesar Rp. 769.451.291. Secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	%
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>316.000.000</b>	<b>0</b>	<b>(316.000.000)</b>	<b>(100)</b>
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>316.000.000</b>	<b>0</b>	<b>(316.000.000)</b>	<b>(100)</b>
4.1.02	Retribusi Daerah	316.000.000	0	(316.000.000)	(100)
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>				
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>12.870.246.737</b>	<b>11.828.535.763</b>	<b>(1.041.710.974)</b>	<b>(8.09)</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	7.468.017.136	7.386.185.845	(81.831.291)	(1.10)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.402.229.601	4.442.349.918	(959.879.683)	(17.77)
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>106.433.083</b>	<b>191.433.083</b>	<b>85.000.000</b>	<b>79.86</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	106.433.083	141.433.083	35.000.000	32.88
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0	50.000.000	50.000.000	100
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>12.976.679.820</b>	<b>12.019.968.846</b>	<b>(956.710.974)</b>	<b>(7.37)</b>

## 6. Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat didukung oleh sarana dan prasarana sebagaimana pada tabel berikut:

NO	JENIS/NAMA BARANG	Jumlah Barang	KONDISI			KETERANGAN
			BAIK	RUSAK	RUSAK BERAT	
1	Bangunan Gedung Kantor	1	1			Permanen
2	Running Text Nama Kantor DPMPTSP	1	1			
3	Tempat Ibadah	1	1			Permanen
4	Kendaraan Roda Empat	2	2			
5	Sepeda Motor	2	2			
6	AC Sentral	11	11			
7	Printer (Peralatan Personal Komputer)	45	44	1		
8	Serial Printer	27	25	2		
9	3 in 1 Printer Scanner A3	1	1			
10	Faximile	3	3			
11	Closed Circuit Television (CCTV)	1	1			
12	Digital Thermometer	2	2			
13	Card Reader (Peralatan Mainframe)	1	1			
14	Cable	1	1			
15	Clipp On	2	2			
16	External/ Portable Hardisk	9	8		1	
17	Dispenser	6	6			
18	Camera Conference	3	3			

NO	JENIS/NAMA BARANG	Jumlah Barang	KONDISI			KETERANGAN
			BAIK	RUSAK	RUSAK BERAT	
19	Alat Hiasan	8	8			
20	Komputer Unit/Jaringan	1	1			
21	Handled GPS	1	1			
22	Gordyin/Kray	6	6			
23	Filing Cabinet Besi	4	4			
24	Hard Disk	11	11			
25	Kitchen Set	1	1			
26	Kamera Udara	1	1			
27	Kamera Stile	3	3			
28	Keyboard (Peralatan Personal Komputer)	5	5			
29	Lemari Besi/Metal	4	4			
30	Lemari Kaca	1	1			
31	Lemari Es	2	2			
32	Laptop	12	10		2	
33	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	1			
34	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	6	6			
35	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	17	17			
36	Kursi Tamu	1	1			
37	Lensa Kamera	2	2			
38	Layar Film/Projector	1	1			
39	Lemari Camera	1	1			
40	Persediaan Lain-Lain	1	1			
41	Monitor	8	8			
42	Rak Besi	13	13			
43	Local Area Network (LAN)	2	2			
44	P.C Unit	51	49		2	
45	Meja Tamu Ruangn Tunggu Pejabat Eselon II	1	1			
46	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2	2			
47	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	1			
48	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	3	3			
49	Propile Proyektor Toyo Series	2	2			
50	Router	1	1			
51	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	3	3			
52	Note Book	4	4			
53	Mesin Absensi	1	1			
54	PC Workstation	2	2			

NO	JENIS/NAMA BARANG	Jumlah Barang	KONDISI			KETERANGAN
			BAIK	RUSAK	RUSAK BERAT	
55	Mounting Kamera	2	2			
56	Memory (Peralatan Personal Komputer)	2	2			
57	Microphone	3	3			
58	Sound System	1				
59	Set Studio Light Signal	1				
60	Tas Kamera	2				
61	Tripod Camera	2				
62	Speaker Komputer	1				
63	Umbul-Umbul / Bendera Hias	1				
64	Switch	1				
65	Sofa	3				
66	Televisi	6				
67	Server	1				
68	UPS for Workstation Desktop PC	1				
69	Uninterruptible Power Supply (UPS)	60	57		3	
70	Wireless Router	1				
71	Workstation Desktop PC	1				
72	Transformator	1				
	<b>Total</b>	<b>393</b>	<b>359</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	

## B. PERMASALAHAN UTAMA (ISU-ISU STRATEGIS)

Isu-isu strategis yang menjadi fokus kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat untuk periode 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan realisasi investasi sebagai bagian dari penciptaan iklim yang kondusif bagi penanaman modal dan kemudahan berusaha.
2. Meningkatkan pelayanan perizinan dan nonperizinan baik secara offline maupun online untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, baik, efisien, efektif dan transparan serta akuntabel kepada masyarakat.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategis mengandung visi, misi, tujuan/sasaran, program dan kegiatan yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai.

##### 1. VISI

Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat pada prinsipnya mengacu kepada Visi Pembangunan Kepala Daerah, yaitu:

**“TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KALIMANTAN  
BARAT MELALUI PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR  
DAN PERBAIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN”**

Makna Visi tersebut mengandung pengertian bahwa 5 (lima) tahun yang akan datang kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat akan fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur seperti membuka keterisolasian kawasan dengan menambah panjang jalan (membangun jalan baru), membangun jembatan, meningkatkan kualitas jalan yang sudah ada, mendorong percepatan pembangunan pelabuhan samudera, mendorong peningkatan produksi listrik untuk meningkatkan rasio elektrifikasi serta untuk menopang program hilirisasi (industrialisasi), menambah pasokan air bersih, memperluas ruang terbuka hijau, dan lain-lain. Bersamaan dengan itu, juga akan dilakukan perbaikan tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.

Percepatan pembangunan infrastruktur dan perbaikan tata kelola pemerintahan akan menjadi landasan utama bagi keseluruhan pelaksanaan program pembangunan yang hasil akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, yaitu rakyat yang mampu memenuhi kebutuhan primer dan sekunder, hidup dalam lingkungan masyarakat yang agamis, demokratis, berbudaya, bermoral serta dalam suasana yang aman dan damai. Kesejahteraan rakyat seperti ini akan tercermin dalam seluruh aspek kehidupan, dalam kelembagaan, pranata, dan nilai-nilai yang melandasi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya.

## 2. MISI

Adapun misi yang telah ditetapkan berdasarkan visi sebagaimana dikemukakan diatas dan berhubungan dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat adalah Misi ke-4 yaitu: **“Mewujudkan Masyarakat Sejahtera”** yaitu dengan mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, mempertegas keberpihakan pemerintah terhadap kelompok masyarakat dan wilayah yang kurang beruntung, menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek pelayanan sosial, dan mempercepat proses hilirisasi dengan memperkuat sinergi antara sektor pertanian dalam arti luas dan sektor pertambangan dengan sektor industri pengolahan.

Persoalan ketersediaan infrastruktur menjadi salah satu penyebab kurangnya minat investor menanamkan modal. Seperti sektor primer dengan bidang usaha perkebunan masih mendominasi bidang usaha yang paling diminati karena infrastruktur relatif tersedia. Sedangkan untuk sektor sekunder perkembangannya belum signifikan karena diperlukan infrastruktur (jalan, listrik dan pelabuhan) yang memadai. Disamping itu, pengembangan kerjasama antar pemerintah, swasta dan masyarakat, termasuk dalam pengelolaan promosi investasi perlu mendapat penguatan dalam upaya peningkatan realisasi investasi. Peningkatan investasi memang memerlukan penguatan kerjasama antar pemerintah, swasta dan masyarakat termasuk pengelolaan promosi investasi.

## 3. TUJUAN DAN SASARAN

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat dalam proses penyelenggaraan pembangunan di bidang Penanaman Modal dan pelayanan untuk periode 2018-2023, mempunyai tujuan meningkatnya nilai investasi dengan sasaran meningkatnya nilai investasi dan meningkatnya kualitas pelayanan terpadu satu pintu.

Untuk memenuhi tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai, Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut:

1. Jumlah nilai investasi;
2. Indeks kepuasan masyarakat;
3. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

## B. PERJANJIAN KINERJA

Pada tahun 2023, Gubernur Kalimantan Barat dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat telah menandatangani Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023. Untuk mendelegasikan

tugas-tugas yang termuat di dalam dokumen perjanjian kinerja tersebut, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat juga telah menandatangani Dokumen Perjanjian Kinerja dengan antar para Pejabat Struktural eselon III dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat, agar pelaksanaan program dan kegiatan lebih terarah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang dan selanjutnya Perjanjian Kinerja tersebut ditandatangani secara berjenjang.

Adapun program dan kegiatan yang termuat di dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Gubernur Kalimantan Barat dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Kalimantan Barat

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Nilai Investasi	Jumlah Nilai Investasi	21.52 T
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Indeks Kepuasan Masyarakat	A
3.	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A

Program	Anggaran	Keterangan
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 9.787.819.974	APBD
- Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp 613.539.900	APBD
- Program Promosi Penanaman Modal	Rp 630.918.600	APBD (DAU+DAK)
- Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp 778.591.748	APBD
- Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp 1.073.726.498	APBD (DAU+DAK)
- Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp 92.083.100	APBD
<b>TOTAL APBD</b>	<b>Rp 12.976.679.820</b>	
- Program Penanaman Modal	Rp 318.639.000	APBN
- Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	Rp 140.170.000	APBN
<b>TOTAL APBN</b>	<b>Rp 458.809.000</b>	
<b>TOTAL APBD + APBN</b>	<b>Rp 13.435.488.820</b>	

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023 merupakan capaian dari sasaran strategis yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis Tahun 2018-2023 DPMPTSP Provinsi Kalimantan Barat yang diukur melalui indikator kinerja utama. Tingkat pencapaian kinerja sasaran strategis DPMPTSP Prov. Kalbar Tahun 2023 dapat disajikan sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2023		%
		Target	Realisasi	
Meningkatnya Nilai Investasi	Jumlah Nilai Investasi	21.52 T	26.90 T	124.99%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Indeks Kepuasan Masyarakat	A	A	88.55%
Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	A	81.20%

Pada Tahun 2023, Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP Prov. Kalbar mengalami perubahan pada sasaran strategis yaitu Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah yang mana pada indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah yang mengalami perubahan dan masih dalam masa evaluasi dan menggunakan pedoman yang baru, sehingga IKU tersebut berubah menjadi Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan dengan indikator kerjanya yaitu Nilai SAKIP Perangkat Daerah. Pengukuran capaian kinerja merupakan hasil suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2023 yang selanjutnya dijelaskan sebagai berikut :



### Sasaran Meningkatnya Nilai Investasi

▪ Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	%		
Meningkatnya Nilai Investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	459.589.900	451.916.514	98.33	<b>133.25</b>	<b>8,49</b>
	Program Promosi Penanaman Modal	541.618.600	537.331.388	99.21		
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1.000.456.498	940.157.709	93.97		
	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	69.643.100	51.902.248	74.53		
<b>RATA-RATA</b>				<b>91,51</b>	<b>133.25</b>	<b>8,49</b>

Apabila dibandingkan antara rata-rata persentase realisasi anggaran sebesar 91,51% dengan realisasi capaian kinerja sebesar 133,25%, diperoleh tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 8,49 pada tahun anggaran 2023.

▪ Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

1. Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dengan pagu awal Rp. 384.883.000,- yang kemudian mengalami perubahan menjadi Rp. 290.783.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 290.558.699,- atau 99.92%. Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyamakan persepsi terkait Kemudahan Pelayanan Perizinan dan dukungan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan Triwulan IV 2023 antara lain:

- a. Rapat persiapan Rapat Implementasi Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan Di Bidang Penanaman Modal Antara Usaha Besar Dengan Usaha

- Mikro, Dan Menengah Di Daerah yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 bertempat di Aula DPMPTSP Prov. Kalbar
- b. Rapat Pembahasan perubahan Rancangan Perda Provinsi Kalimantan Barat yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 bertempat di Aula DPMPTSP Prov. Kalbar
  - c. Rapat persiapan Sosialisasi Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala DPMPTSP Prov. Kalbar yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 bertempat di Aula DPMPTSP Prov. Kalbar
  - d. Rapat Implementasi Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan Di Bidang Penanaman Modal Antara Usaha Besar Dengan Usaha Mikro, Dan Menengah Di Daerah yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2023 bertempat di Hotel Golden Tulip Pontianak.
  - e. Perjalanan Dinas dalam rangka pembahasan lebih lanjut rencana kerja penyusunan IPRO (Investment Project Ready To Offer) ke Kementerian Investasi/BKPM di Jakarta pada tanggal 19 Juni – 21 Juni 2023
  - f. Rapat Evaluasi Kegiatan Pemberdayaan Usaha Daerah tentang Implementasi Permen Investasi/Kepala BKPM Nomor 1 Tahun 2022 yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 bertempat di Ruang Rapat DPMPTSP Prov. Kalbar
  - g. Rapat Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/insentif dan Kemudahan Penanaman Modal yang dilaksanakan hari Senin tanggal 17 Juli 2023 bertempat di Ruang Rapat DPMPTSP Prov. Kalbar
  - h. Perjalanan dinas dalam rangka Sinkronisasi Kegiatan Pemberdayaan Usaha Terkait dengan pelaksanaan kemitraan usaha kecil dan menengah dengan perusahaan PMA/PMDN di Kota Singkawang pada tanggal 2 – 4 Agustus 2023.
  - i. Perjalanan dinas dalam rangka sinkronisasi terkait penyusunan potensi dan peluang investasi daerah di Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang pada tanggal 3 – 5 Agustus 2023.
  - j. Diskusi dan Pembahasan tentang Potensi Investasi dan Peran Pemerintah Daerah Dalam mendukung Promosi Investasi di Kalimantan Barat dengan Bank Indonesia Perwakilan Kalbar yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 bertempat di Aula DPMPTSP Prov. Kalbar.
  - k. Perjalanan Dinas dalam rangka pematangan rencana kegiatan Penyusunan IPRO ke Kementerian Investasi/BKPM di Jakarta pada tanggal 25 - 27 September 2023.

- l. Perjalanan Dinas dalam rangka pembahasan penyusunan RUPM dengan Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal di Kementerian Investasi/BKPM di Jakarta pada tanggal 25 - 27 September 2023.
  - m. Perjalanan Dinas dalam rangka pemetaan potensi dan peluang investasi untuk penyusunan IPRO ke DPMPTK Kota Singkawang pada tanggal 4 – 6 Oktober 2023.
  - n. Perjalanan Dinas dalam rangka pemetaan potensi dan peluang investasi untuk penyusunan IPRO ke DPMPTSP Kabupaten Sambas pada tanggal 4 – 6 Oktober 2023.
  - o. Perjalanan dinas dalam rangka pembahasan pelaksanaan workshop penyusunan IPRO ke Kementerian Investasi/BKPM di Jakarta pada tanggal 24 – 26 Oktober 2023.
  - p. Rapat persiapan Kegiatan Workshop Penyusunan Investment Project Ready to Offer (IPRO) yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 bertempat di Ruang Rapat Bidang PM DPMPTSP Provinsi Kalbar.
  - q. Rapat Kegiatan Pemetaan Potensi dan Peluang Investasi di Provinsi Kalbar yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 bertempat di Ruang Rapat DPMPTSP Provinsi Kalbar.
  - r. Perjalanan dinas dalam rangka kegiatan penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi di Kota Singkawang pada tanggal 6 – 8 November 2023.
  - s. Perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan pada acara serah terima bukti asli (fisik) jaminan reklamasi dan pasca tambang di Jakarta pada tanggal 13 – 15 November 2023.
  - t. Bimtek Penyusunan Investment Project Ready to Offer (IPRO) di Provinsi Kalimantan Barat yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 bertempat di Aula DPMPTSP Provinsi Kalimantan Barat.
  - u. Perjalanan dinas dalam rangka kegiatan pelaksanaan penyusunan Bimtek IPRO di Provinsi Kalbar pada tanggal 23 November 2023 (Narasumber dari Kementerian Investasi/BKPM) .
  - v. Perjalanan dinas dalam rangka sinkronisasi terkait penyusunan potensi dan peluang investasi di Kota Singkawang pada tanggal 27 – 29 November 2023.
  - w. Perjalanan dinas dalam rangka sinkronisasi kegiatan penetapan kebijakan daerah dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal di Kota Singkawang pada tanggal 14 – 15 Desember 2023.
2. Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dengan pagu awal Rp. 52.264.300,- yang kemudian mengalami

- perubahan menjadi Rp. 39.664.300,- dengan realisasi sebesar Rp. 38.876.085,- atau 98.01%. Kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan Triwulan IV 2023 antara lain:
- a. Perjalanan Dinas dalam rangka Penyelarasan Rekognisi Lebih Lanjut Terkait Rencana Investasi di DPMPTSP Kabupaten Sanggau pada tanggal 27 Maret – 29 Maret 2023.
  - b. Perjalanan dinas dalam rangka Sinkronisasi kegiatan Pemberdayaan Usaha terkait dengan pelaksanaan kemitraan usaha mikro, kecil dan menengah dengan perusahaan PMA/PMDN di Kabupaten Sambas pada tanggal 23 – 25 Agustus 2023.
  - c. Perjalanan dinas dalam rangka evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal di DPMPTSP Kabupaten Sanggau pada tanggal 6 – 8 November 2023.
3. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi dengan pagu awal Rp. 94.092.000,- yang kemudian mengalami perubahan menjadi Rp. 72.042.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 65.421.920,- atau 90.81%. Kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan Triwulan IV 2023 antara lain:
- a. Perjalanan dinas dalam rangka pengumpulan data informasi untuk penyusunan perubahan Peraturan Gubernur Tentang RUPM Prov. Kalbar di DPMPTSP Kab. Sanggau pada tanggal 11 – 13 Oktober 2023.
  - b. Perjalanan dinas dalam rangka pengumpulan data informasi untuk penyusunan perubahan Peraturan Gubernur Tentang RUPM Prov. Kalbar di DPMPTSP Kab. Sintang pada tanggal 11 – 13 Oktober 2023.
  - c. Perjalanan dinas dalam rangka menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2023 di Jakarta pada tanggal 4 – 8 Desember 2023.
  - d. Rapat Kegiatan Penyusunan Draft Perubahan Pergub RUPM yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 di Ruang Rapat DPMPTSP Provinsi Kalbar.
  - e. Rapat Evaluasi Kegiatan Penyusunan Draft Perubahan Pergub RUPM yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 di Ruang Rapat DPMPTSP Provinsi Kalbar.
4. Sub Kegiatan Penyediaan peta Potensi dan peluang Usaha Provinsi dengan pagu awal Rp. 82.300.600,- yang kemudian mengalami perubahan menjadi Rp. 57.100.600,- dengan realisasi sebesar Rp. 57.059.810,- atau 99.93%. Kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan Triwulan IV 2023 antara lain:
- a. Perjalanan Dinas dalam rangka pembahasan lebih lanjut dengan Direktorat Pengembangan Potensi Daerah Terkait pemutakhiran data Potensi Investasi Regional (PIR) di Kementerian Investasi/BKPM Jakarta tanggal 19 Juni – 21 Juni 2023.

- b. Rapat pembahasan tentang Potensi dan Peluang Investasi Daerah dengan Dirjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 di Ruang Rapat DPMPTSP Provinsi Kalbar.
  - c. Rapat penjelasan investasi swasta dalam RKP 2024 yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 di Ruang Rapat DPMPTSP Provinsi Kalbar
  - d. Perjalanan dinas dalam rangka sinkronisasi terkait penyusunan potensi dan peluang investasi daerah di Kabupaten Sambas pada tanggal 23 – 25 Agustus 2023.
  - e. Perjalanan dinas dalam rangka sinkronisasi penyediaan peta potensi dan peluang usaha provinsi ke Kementerian Investasi/BKPM di Jakarta pada tanggal 13 -15 November 2023.
  - f. Perjalanan dinas dalam rangka menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2023 di Jakarta pada tanggal 4 – 7 Desember 2023.
5. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi dengan pagu awal Rp. 630.918.600,- yang kemudian mengalami perubahan menjadi Rp. 541.618.600,- dengan realisasi sebesar Rp. 537.331.388,- atau 99.21%. Kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan Triwulan IV 2023 antara lain:
- a. Pembuatan video profil potensi investasi daerah, dengan output 1 video profil potensi investasi Kalimantan Barat;
  - b. Pembuatan video profil kantor, dengan output 1 video profil kantor DPMPTSP
  - c. Pembuatan video profil potensi investasi daerah, dengan output 1 video profil potensi investasi “Bandar Udara Singkawang”;
  - d. Pembuatan buku, dengan output 1 Buku Potensi Investasi Bandar Udara Singkawang;
  - e. Pembuatan leaflet, dengan output Leaflet Bandar Udara Singkawang;
  - f. Pembuatan aplikasi, dengan output Aplikasi SELARASIN (Sistem Layanan Terpadu Satu Pintu).
6. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal dengan pagu awal Rp. 78.469.898,- yang kemudian mengalami perubahan menjadi Rp. 69.329.898,- dengan realisasi sebesar Rp. 62.096.731,- atau 89.57%. Kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan Triwulan IV 2023 antara lain:
- a. Menyurati perusahaan penanaman modal PMDN dan PMA mengenai pemberitahuan kewajiban penyampaian LKPM Triwulan IV Tahun 2022
  - b. Menyurati perusahaan penanaman modal PMDN dan PMA mengenai pemberitahuan kewajiban penyampaian LKPM Triwulan I Tahun 2023
  - c. Menyurati perusahaan penanaman modal PMDN dan PMA mengenai pemberitahuan kewajiban penyampaian LKPM Triwulan II Tahun 2023.

- d. Menyurati perusahaan penanaman modal PMDN dan PMA mengenai pemberitahuan kewajiban penyampaian LKPM Triwulan III Tahun 2023.
- e. Menyurati perusahaan penanaman modal PMDN dan PMA mengenai pemberitahuan kewajiban penyampaian LKPM Triwulan IV Tahun 2023.
- f. Terlaksananya rapat persiapan Sosialisasi Pelaksanaan Pengendalian Penanaman Modal dalam rangka Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- g. Melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Pengendalian Penanaman Modal dalam rangka Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 bertempat di Ruang Rapat DPMPTSP Provinsi Kalimantan Barat.
- h. Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Pengendalian Penanaman Modal Dalam Rangka Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko diikuti sebanyak 50 orang yang terdiri dari DPMPTSP Provinsi, Pemegang Hak Akses Pengawasan pada DPMPTSP Kabupaten/Kota, dan Pemegang Hak Akses Pengawasan pada OPD Teknis Provinsi Kalimantan Barat.
- i. Terlaksananya kegiatan Inspeksi Lapangan dan Pemantauan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagai berikut
  - Terlaksananya kegiatan dalam rangka Pemantauan/Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Secara Terintegrasi ke PT. Energi Unggul Persada di Kabupaten Mempawah pada tanggal 14 - 15 Maret 2023
  - Terlaksananya kegiatan Inspeksi Lapangan dan Pemantauan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada CV. Mitra Sinar Bersama dengan bidang usaha penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum di Kota Pontianak pada tanggal 6 Juli 2023
  - Terlaksananya kegiatan Inspeksi Lapangan dan Pemantauan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada PT. Joseph Tresna Karya dengan bidang usaha Industri Minyak dan Lemak Nabati di Kota Pontianak pada tanggal 6 Juli 2023
  - Terlaksananya kegiatan Inspeksi Lapangan dan Pemantauan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada PT. Pelayaran Armada Samudera Ashoka dengan bidang usaha Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri untuk Barang di Kota Pontianak pada tanggal 7 Juli 2023
  - Terlaksananya kegiatan Inspeksi Lapangan dan Pemantauan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada PT. Sungai Budi dengan bidang usaha Angkutan Bermotor untuk Barang Umum di Kota Pontianak pada tanggal 7 Juli 2023

- Terlaksananya kegiatan Inspeksi Lapangan dan Pemantauan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada CV. Sumber Berkat Usaha dengan bidang usaha Penggalan Pasir di Kabupaten Sintang pada tanggal 20 – 22 Juli 2023
  - Terlaksananya kegiatan Inspeksi Lapangan dan Pemantauan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada PT. Anugrah Bunda Jaya dengan bidang usaha Aktivitas Rumah Sakit Swasta di Kabupaten Sintang pada tanggal 20 – 22 Juli 2023
  - Terlaksananya kegiatan Inspeksi Lapangan dan Pemantauan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada PT. Wisma Nusantara dengan bidang usaha Penyediaan Minuman di Kota Pontianak pada tanggal 5 Desember 2023
  - Terlaksananya kegiatan Inspeksi Lapangan dan Pemantauan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada PT. Sentosa Mitra Kalindo dengan bidang usaha Real Estate yang Dimiliki Sendiri Atau Disewakan di Kota Pontianak pada tanggal 5 Desember 2023
  - Terlaksananya kegiatan Inspeksi Lapangan dan Pemantauan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada PT. Nada Gembira Bangsa dengan bidang usaha BAR di Kota Pontianak pada tanggal 5 Desember 2023
  - Terlaksananya kegiatan Inspeksi Lapangan dan Pemantauan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada PT. Bintang Jaya Proteina Feedmill dengan bidang usaha Industri Konsentrat Makanan Hewan di Kota Singkawang pada tanggal 14 - 16 Desember 2023
- j. Pelaksanaan Pendampingan dalam pengisian LKPM bagi PMA/PMDN dan UMKM.
- k. Menghadiri Rapat Koordinasi Pencapaian Target Realisasi Investasi Tahun Anggaran 2023 pada tanggal 22 – 24 Agustus 2023 di Jakarta.
- l. Menghadiri Rapat Pembahasan Evaluasi Implementasi Sub Sistem Pengawasan OSS Berbasis Risiko di Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 23 Nopember – 25 Nopember 2023 di Kementerian Investasi/BKPM Jakarta.
- m. Menghadiri Focus Group Discussion Rancangan Prioritas Pembangunan dan Pendanaan Nasional Di Wilayah Kalimantan Barat pada tanggal 29 Nopember – 1 Desember 2023 di Jakarta.
7. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal dengan pagu awal Rp. 663.741.900,- yang kemudian mengalami perubahan menjadi Rp. 628.571.900,- dengan realisasi sebesar Rp. 594.972.684,- atau 94.96%. Kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan Triwulan IV 2023 antara lain:
- a. Terlaksananya kegiatan pendukung Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal seperti pembayaran honorarium tim penyelesaian

- permasalahan, Bahan untuk Kegiatan Kantor ATK, kertas – cover, bahan cetak, bahan Komputer, honorarium narasumber moderator.
- b. Ke Kementerian Investasi/BKPM RI di Jakarta dalam rangka Fasilitasi dan arahan atas pencabutan Perizinan Berusaha PT. SAWIT REZEKI ABADI di Kabupaten Melawi pada tanggal 11 – 13 Desember 2023
- c. Kegiatan Bimbingan Teknis/Sosialisasi
- Melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko **Angkatan I** pada sektor Pertambangan pada tanggal 16 Maret 2023 bertempat di ruang Boronia Room Lantai 2 Orchardz Hotel A. yani Pontianak dengan jumlah peserta sebanyak 42 Orang.
  - Melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko **Angkatan II** pada sektor Perdagangan pada tanggal 16 Mei 2023 bertempat di ruang Boronia Room Lantai 2 Orchardz Hotel A. yani Jl. Perdana Pontianak dengan jumlah peserta sebanyak 42 Orang.
  - Melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko **Angkatan III** pada sektor Perikanan pada tanggal 17 Mei 2023 bertempat di ruang Boronia Room Lantai 2 Orchardz Hotel A. Yani Jl. Perdana Pontianak dengan jumlah peserta sebanyak 42 Orang.
  - Melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko **Angkatan IV** pada sektor Pariwisata pada tanggal 26 Juni 2023 bertempat di ruang Terasky Dance Floor Lantai 8 Transera Hotel Pontianak dengan jumlah peserta sebanyak 42 Orang.
  - Melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko **Angkatan V** pada sektor Perhubungan pada tanggal 27 Juni 2023 bertempat di ruang Terasky Dance Floor Lantai 8 Transera Hotel Pontianak dengan jumlah peserta sebanyak 42 Orang.
  - Melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bagi Pelaku Usaha PMDN/PMA **Angkatan VI** pada tanggal 30 Agustus 2023 bertempat di ruang Boronia Room Lantai 2 Orchardz Hotel A. yani Jl. Perdana Pontianak dengan jumlah peserta sebanyak 42 Orang.
  - Melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bagi Pelaku Usaha PMDN/PMA **Angkatan VII** pada tanggal 31 Agustus 2023 bertempat di ruang Boronia Room Lantai 2 Orchardz Hotel A. yani Jl. Perdana Pontianak dengan jumlah peserta sebanyak 42 Orang.



- Melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bagi Pelaku Usaha PMDN/PMA **Angkatan VIII** pada tanggal 25 Oktober 2023 bertempat di ruang Raflesia 2 Ballroom Lantai 9 Orchardz Hotel Gajah Mada Jl. Gajah Mada No. 89 Pontianak dengan jumlah peserta sebanyak 42 Orang.
  - Melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bagi Pelaku Usaha PMDN/PMA **Angkatan IX** pada tanggal 26 Oktober 2023 bertempat di ruang Raflesia 2 Ballroom Lantai 9 Orchardz Hotel Gajah Mada Jl. Gajah Mada No. 89 Pontianak dengan jumlah peserta sebanyak 42 Orang.
  - Melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bagi Pelaku Usaha PMDN/PMA **Angkatan X** pada tanggal 30 Nopember 2023 bertempat di Hotel Maestro Jl. Sultan Abdurahman Pontianak dengan jumlah peserta sebanyak 42 Orang.
- d. Kegiatan Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal
- Identifikasi penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh PT. MULTI PRIMA ENTAKAI di Kabupaten Sanggau pada tanggal 29 -31 Maret 2023.
  - Terlaksananya kegiatan peninjauan langsung ke lokasi proyek dalam rangka identifikasi penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya pada PT. PALM AGRO MAKMUR di Kabupaten Landak tanggal 24 – 26 Mei 2023.
  - Terlaksananya kegiatan peninjauan langsung ke lokasi proyek dalam rangka identifikasi penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya pada CV. PERSADA ENTERTAINMENT di Kabupaten Melawi pada tanggal 6 – 8 September 2023.
  - Terlaksananya kegiatan peninjauan langsung ke lokasi proyek dalam rangka identifikasi penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya pada PT. AGRO SUKSES LESTARI di Kabupaten Sintang pada tanggal 11 - 13 September 2023.
  - Terlaksananya kegiatan peninjauan langsung ke lokasi proyek dalam rangka identifikasi penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya pada PT. SEMESTA ALAM MAKMUR ESA di Kabupaten Bengkayang pada tanggal 13 - 15 September 2023.
  - Terlaksananya kegiatan peninjauan langsung ke lokasi proyek dalam rangka identifikasi penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku

Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya pada PT. AGRO ANDALAN di Kabupaten Sekadau tanggal 19 - 21 September 2023.

- Terlaksananya kegiatan peninjauan langsung ke lokasi proyek dalam rangka identifikasi penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya pada PT. KAWEDAR WOOD INDUSTRIES di Kabupaten kapuas Hulu tanggal 25 - 27 September 2023.
- Terlaksananya kegiatan peninjauan langsung ke lokasi proyek dalam rangka identifikasi penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya pada PT. PERTIWI LENGGANA AGROMAS di Kabupaten Ketapang tanggal 4 – 6 Oktober 2023.
- Terlaksananya kegiatan peninjauan langsung ke lokasi proyek dalam rangka identifikasi penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya pada PT. KENCANA ALAM PERMAI di Kabupaten Sintang tanggal 11 - 13 Oktober 2023.
- Terlaksananya kegiatan peninjauan langsung ke lokasi proyek dalam rangka identifikasi penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya pada PT. PERSADA PRATAMA CEMERLANG di Kabupaten Sanggau tanggal 18 – 20 Oktober 2023.
- Terlaksananya kegiatan peninjauan langsung ke lokasi proyek dalam rangka identifikasi penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya pada PT. AGRO ANUGERAH LESTARI di Kabupaten Sekadau tanggal 18 – 20 Oktober 2023.
- Terlaksananya kegiatan peninjauan langsung ke lokasi proyek dalam rangka identifikasi penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya pada PT. USAHA AGRO INDONESIA di Kabupaten Ketapang tanggal 6 – 8 Nopember 2023.
- Terlaksananya kegiatan peninjauan langsung ke lokasi proyek dalam rangka identifikasi penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya pada PT. PERSADA SAWIT PLANTATION di Kabupaten Sintang tanggal 16 – 18 Nopember 2023.
- Terlaksananya kegiatan peninjauan langsung ke lokasi proyek dalam rangka identifikasi penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya pada PT. PUTRA MAKMUR LESTARI di Kabupaten Bengkayang tanggal 27 – 29 Nopember 2023.
- Terlaksananya kegiatan peninjauan langsung ke lokasi proyek dalam rangka identifikasi penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku

Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya pada PT. ARTU PLANTATION di Kabupaten Ketapang tanggal 7 – 9 Desember 2023.

8. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal dengan pagu awal Rp. 331.514.700,- yang kemudian mengalami perubahan menjadi Rp. 304.554.700,- dengan realisasi sebesar Rp. 283.088.294,- atau 92.85%. Kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan Triwulan IV 2023 antara lain:
  - a. Terlaksananya kegiatan pendukung Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal seperti pembayaran honorarium tim pengawasan pelaksanaan penanaman modal, Bahan untuk Kegiatan Kantor ATK, kertas – cover, bahan cetak, bahan Komputer.
  - b. Terlaksananya rapat Analisa dan verifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku usaha sebagai berikut :
    - Tanggal 28 april 2023 bertempat di DPMPTSP Provinsi Kalimantan Barat.
    - Tanggal 8 Mei 2023 bertempat di DPMPTSP Provinsi Kalimantan Barat.
    - Tanggal 5 Juni 2023 bertempat di DPMPTSP Provinsi Kalimantan Barat.
    - Tanggal 16 agustus 2023 bertempat di DPMPTSP Provinsi Kalimantan Barat.
  - c. Terlaksananya rapat Rapat Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Pelaku Usaha sebagai berikut :
    - Tanggal 15 Mei 2023 bertempat di DPMPTSP Provinsi Kalimantan Barat
    - Tanggal 12 Juni 2023 bertempat di DPMPTSP Provinsi Kalimantan Barat
    - Tanggal 5 September 2023 bertempat di DPMPTSP Provinsi Kalimantan Barat
  - d. Terlaksananya kegiatan Inspeksi Lapangan dan Pengawasan terhadap pelaku usaha sebagai berikut :
    - Terlaksananya kegiatan Inspeksi Lapangan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal PT. Permata Hijau Lestari di Kabupaten Sanggau pada tanggal 7 -9 Maret 2023.
    - Terlaksananya kegiatan Inspeksi Lapangan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal PT. Cahaya Unggul Prima di Kabupaten Sintang pada tanggal 8 - 10 Maret 2023.
    - Terlaksananya kegiatan Inspeksi Lapangan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal PT. Indocement Tunggal Perkasa di Kabupaten Mempawah pada tanggal 20 - 21 Maret 2023.
    - Terlaksananya kegiatan Inspeksi Lapangan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal PT. Global Indonesia Asia Sejahtera di Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 20 - 21 Maret 2023.

- Terlaksananya kegiatan Inspeksi Lapangan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal PT. Sumatera Makmur Lestari di Kabupaten Sekadau pada tanggal 28 - 30 Maret 2023.
- Terlaksananya kegiatan Inspeksi Lapangan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal PT. Sumberdaya Sewatama di Kabupaten Ketapang pada tanggal 4 – 6 April 2023.
- Terlaksananya kegiatan Inspeksi Lapangan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal PT. Hutan Kencana Damai di Kabupaten Ketapang pada tanggal 4 - 6 April 2023.
- Terlaksananya kegiatan Inspeksi Lapangan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal PT. Kreatif Sukses Usaha di Kota Singkawang pada tanggal 11 - 13 April 2023.
- Terlaksananya kegiatan Inspeksi Lapangan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal CV. Heksa Sumber Usaha di Kabupaten Sambas pada tanggal 11 - 13 April 2023.
- Terlaksananya kegiatan Inspeksi Lapangan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal PT. Welindo Erabadi Lojaya di Kabupaten Sekadau pada tanggal 8 – 10 Mei 2023.
- Terlaksananya kegiatan Inspeksi Lapangan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal PT. Bumi Sawit Utama di Kabupaten Melawi pada tanggal 9 – 11 Mei 2023.
- Terlaksananya kegiatan Inspeksi Lapangan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal PT. Gunung Rijuan Sejahtera di Kabupaten Landak pada tanggal 10 – 12 Mei 2023.
- Terlaksananya kegiatan Inspeksi Lapangan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal PT. Indah Subur Sawit di Kabupaten Landak pada tanggal 10 – 12 Mei 2023.
- Terlaksananya kegiatan Inspeksi Lapangan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal PT. Pisang Jaya Mandiri di Kabupaten Hulu pada tanggal 23 Mei 2023.
- Terlaksananya kegiatan Inspeksi Lapangan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal PT. Lucky Indo Aquatic di Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 23 Mei 2023.
- Terlaksananya kegiatan Inspeksi Lapangan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal PT. Sarana Esa Citra di Kabupaten Sambas pada tanggal 22 – 24 Mei 2023.

- Terlaksananya kegiatan Inspeksi Lapangan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal PT. Wawasan Kebun Nusantara di Kabupaten Bengkayang pada tanggal 23 – 25 Mei 2023.
- Terlaksananya kegiatan Inspeksi Lapangan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal PT. Ledo Lestari di Kabupaten Bengkayang pada tanggal 23 – 25 Mei 2023.
- Terlaksananya kegiatan Inspeksi Lapangan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal PT. Anugrah Argon di Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 30 – 31 Mei 2023
- Terlaksananya kegiatan Inspeksi Lapangan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal PT. Mitra Andalan Sejahtera di Kabupaten Mempawah pada tanggal 30 – 31 Mei 2023.
- Terlaksananya kegiatan Inspeksi Lapangan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal CV. Sanika Sejahtera Di Kabupaten Kayong Utara pada tanggal 29 – 31 Mei 2023.
- Terlaksananya kegiatan Inspeksi Lapangan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal PT. Kalimantan Agro Pusaka Di kabupaten Kayong Utara pada tanggal 30 Mei – 1 Juni 2023.
- Terlaksananya kegiatan Inspeksi Lapangan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal PT. Agro Lestari Mandiri Di kabupaten Ketapang pada tanggal 30 Mei – 1 Juni 2023.
- Terlaksananya kegiatan Inspeksi Lapangan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal PT. Sumber Waras Di Kota Pontianak pada tanggal 5 – 8 Juni 2023.
- Terlaksananya kegiatan Inspeksi Lapangan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal CV. Jaya Kota di Kota Pontianak pada tanggal 5 – 8 Juni 2023.
- Terlaksananya kegiatan Inspeksi Lapangan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal CV. Daya Kita Di Kabupaten Sintang pada tanggal 13 - 15 Juni 2023.
- Terlaksananya kegiatan Inspeksi Lapangan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal PT. Mitra Austral Sejahtera Di Kabupaten Sanggau pada tanggal 13 – 15 Juni 2023.
- Terlaksananya kegiatan Inspeksi Lapangan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal PT. Kirana Putera Karya Di Kabupaten Sintang pada tanggal 14 – 16 Juni 2023.

- Terlaksananya kegiatan Inspeksi Lapangan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal PT. Dayang Resort Mandiri di Kota Singkawang pada tanggal 11 – 13 Juli 2023.
- Terlaksananya kegiatan Inspeksi Lapangan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal PT. Fajar Saudara Kusuma di Kabupaten Sambas pada tanggal 10 – 12 Juli 2023.
- Terlaksananya kegiatan Inspeksi Lapangan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal PT. Sangnaga Khatulistiwa Yasa di Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 10 – 12 Mei 2023.
- Terlaksananya kegiatan Inspeksi Lapangan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal PT. Bintang Pratama Mix di Kabupaten Kubu Rayapada tanggal 17 – 18 Juli 2023.
- Terlaksananya kegiatan Inspeksi Lapangan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal PT. Multi Duta Putra di Kabupaten Sekadau pada tanggal 20 – 22 Juli 2023.
- Terlaksananya kegiatan Inspeksi Lapangan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal PT. Mitra Intisejati Plantation di Kabupaten Bengkayang pada tanggal 25 -27 Juli 2023.
- Terlaksananya kegiatan Inspeksi Lapangan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal pada PT. Smart Cakrawala Aviation dengan bidang usaha Reparasi Pesawat Terbang di Kota Singkawang pada tanggal 7 Juli 2023
- Terlaksananya kegiatan Inspeksi Lapangan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal CV. Indah Pangan Lestari di Kabupaten Melawi pada tanggal 2 - 4 Agustus 2023.
- Terlaksananya kegiatan Inspeksi Lapangan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal CV. Multi Perkasa Sejahtera di Kabupaten Landak pada tanggal 10 – 12 Agustus 2023.
- Terlaksananya kegiatan Inspeksi Lapangan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal PT. Indonesia Chemical Alumina di Kabupaten Sanggau pada tanggal 6 – 8 September 2023.
- Terlaksananya kegiatan Inspeksi Lapangan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal PT. Samboja Inti Perkasa di Kabupaten Melawi pada tanggal 6 – 8 September 2023
- Terlaksananya kegiatan Inspeksi Lapangan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal CV. Cundi Perkasa di Kabupaten Sambas pada tanggal 11 – 13 September 2023.

- Terlaksananya kegiatan Inspeksi Lapangan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal PT. Sumatera Unggul Makmur Di Kabupaten Sambas pada tanggal 13 – 15 September 2023.
  - Terlaksananya kegiatan Inspeksi Lapangan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal PT. Agro Kapuas Jaya Di Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 25 – 27 September 2023.
  - Terlaksananya kegiatan Inspeksi Lapangan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal PT. Mitra Saudara Lestari Di Kabupaten Ketapang pada tanggal 4 – 6 Oktober 2023.
  - Terlaksananya kegiatan Inspeksi Lapangan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal PT. Rezeki Kencana Prima Di Kabupaten Landak pada tanggal 9 – 11 Oktober 2023.
  - Terlaksananya kegiatan Inspeksi Lapangan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal PT. Kapuas Rimba Sejahtera Di Kabupaten Landak pada tanggal 9 – 11 Oktober 2023.
  - Terlaksananya kegiatan Inspeksi Lapangan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal PT. Sintang Agro Mandiri Di Kabupaten Landak pada tanggal 11 - 13 Oktober 2023.
  - Terlaksananya kegiatan Inspeksi Lapangan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal PT. Kencana Graha Permai Di Kabupaten Ketapang pada tanggal 6 – 8 Nopember 2023.
  - Terlaksananya kegiatan Inspeksi Lapangan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal PT. Cemindo Bangun Persada Di Kabupaten Mempawah pada tanggal 5 – 6 Desember 2023.
9. Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dengan pagu awal Rp. 92.083.100,- yang kemudian mengalami perubahan menjadi Rp. 69.643.100,- dengan realisasi sebesar Rp. 51.902.248,- atau 74.53%. Kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan Triwulan IV 2023 antara lain :
- a. Terlaksananya rapat Rekonsiliasi Data Realisasi PMDN/PMA, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dan LKPM yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 bertempat di Ruang Rapat DPMPPTSP Prov. Kalimantan Barat dengan jumlah peserta sebanyak 35 orang berasal dari Pejabat di Lingkungan DPMPPTSP Kabupaten/Kota dan pengelola data pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
  - b. Terlaksananya rapat Rekonsiliasi Data Realisasi PMDN/PMA, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dan LKPM yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2023 bertempat di Ruang Rapat DPMPPTSP Prov. Kalimantan Barat

dengan jumlah peserta sebanyak 35 orang berasal dari Pejabat di Lingkungan DPMPTSP Kabupaten/Kota dan pengelola data pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

c. Penyusunan buku realisasi investasi

▪ **Perbandingan realisasi Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI					TARGET 2023
		2019	2020	2021	2022	2023	
Meningkatnya nilai investasi	Jumlah nilai investasi	15,68 T	20,19 T	17,54 T	20,08 T	26,90 T	21,52 T

▪ **Perbandingan realisasi kinerja dengan target akhir RPJMD**

Pada periode Januari – Desember Tahun 2023, realisasi nilai investasi di Provinsi Kalimantan Barat memperoleh nilai sebesar 26.90 T atau 124.99% dari target RPJMD yang ditetapkan yaitu 21,52 T. Untuk pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), target pencapaian indikator jumlah investasi pada periode RPJMD tahun 2019-2023 sebesar 100,56 Triliun dan capaian target hingga tahun 2023 sebesar 100,39 Triliun (99.83%) atau masih terdapat selisih sebesar 0,17 Triliun (0.7%).

▪ **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan standar nasional**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI 2023	TARGET NASIONAL
Meningkatnya Nilai Investasi	Jumlah Nilai Investasi	26,90 T	22.94 T

Realisasi kinerja tahun 2023 dengan indikator jumlah nilai investasi sudah mencapai target nasional yang ditetapkan oleh BKPM RI, dengan target sebesar Rp. 22.94 T. Capaian realisasi investasi Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2023 periode Januari – Desember adalah sebesar Rp. 26,90 T atau 117.26% dari target nasional.

▪ **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran antara lain sebagai berikut:

- 1) Lemahnya SDM penanaman modal di daerah akibat rolling/mutasi staf yang terlalu cepat;



- 2) Belum memadainya dana yang tersedia, sehingga permasalahan di bidang penanaman modal belum dapat terakomodasi seluruhnya;
- 3) Masih rendahnya tingkat kepatuhan perusahaan dalam penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara online ke DPMPTSP Provinsi dan DPMPTSP Kabupaten/Kota;
- 4) Dalam pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap penanaman modal terdapat kendala dalam hal kesulitan meminta data yang konkrit seperti alamat perusahaan yang tidak jelas, email dan no telp perusahaan, sehingga tidak bisa melakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan secara optimal;
- 5) Pelaksanaan pengawasan secara terintegrasi dilaksanakan melalui sistem OSS dimana perusahaan sudah terdapat di dalam system yang mana agak kesulitan untuk mencari alamat lokasi perusahaan;
- 6) Ada beberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan;
- 7) Pelaksanaan pengawasan dilakukan secara terintegrasi melalui sistem OSS, yang mana perusahaan sudah ada dalam list prioritas pengawasan yang mayoritas perusahaan berskala menengah dan berlokasi di Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya sehingga kurang signifikan untuk mendukung pencapaian dan peningkatan realisasi investasi maupun penyerapan anggaran.

Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain:

- a) Melakukan koordinasi intensif dengan Perangkat Daerah terkait untuk membahas regulasi yang tidak sinkron atau saling mengunci;
- b) Mengajukan perubahan/penambahan anggaran kepada Tim TAPD untuk pengalokasian anggaran untuk pemenuhan komponen standar pelayanan Bersurat ke BKD untuk penambahan SDM;
- c) Menyurati BKD terkait usulan penambahan SDM di DPMPTSP Provinsi Kalbar.
- d) Berkoordinasi dengan Diskominfo dan Kementerian Investasi/BKPM terkait jaringan;
- e) Mengkoordinasikan dengan Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian Dalam Negeri dan BPSDM untuk lebih memperbanyak kegiatan yang berkaitan dengan Peningkatan Kapasitas/Diklat SDM bagi penyelenggara perizinan. Khusus untuk Kementerian Investasi /BKPM dimintakan penyelenggaraan Diklat/Bimtek agar diselenggarakan perwilayah sehingga satu daerah dapat mengusulkan peserta diklat dengan jumlah yang memadai;
- f) Akan berkoordinasi dengan BPKM dan pelaku usaha yang telah ditetapkan oleh sistem;

- g) Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Invesatsi/BKPM maupun Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menentukan lokasi pengawasan yang lebih tepat sesuai dengan tujuan dari pengawasan.

**Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

▪ **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	%		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Program Pelayanan Penanaman Modal	628.831.748	616.273.860	98.00	94.28	n/a
<b>RATA-RATA</b>				<b>98,00</b>	<b>94,28</b>	<b>n/a</b>

Apabila dibandingkan antara rata-rata persentase realisasi anggaran sebesar 98.00% dengan realisasi capaian kinerja sebesar 94.28%, maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun anggaran 2023 masih belum efisien dikarenakan nilai capaian kinerja lebih kecil dari nilai realisasi anggaran.

▪ **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

1. Sub Kegiatan Penyediaan pelayanan terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dengan pagu awal Rp. 262.541.348,- yang kemudian mengalami perubahan menjadi Rp. 216.171.348,- dengan realisasi sebesar Rp. 212.113.678,- atau 98.12%. Kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan Triwulan IV 2023 antara lain :
  - a. Kegiatan Rapat yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan IV adalah pada tanggal 31 Maret 2023 dengan agenda Pembahasan Perubahan Persetujuan pada Surat Tanda Keterangan Andon (STKA) dan Pembahasan Mekanisme Penyelenggaraan Perizinan Berusaha UMKU Surat Tanda Keterangan Andon (STKA) dan Surat Tanda Penangkapan Ikan (STPI) ANDON;
  - b. Pada tanggal 5 Juni 2023 dengan agenda rapat Pengenalan/Tutorial Internal Aplikasi Mandiri Pelayanan Non Perizinan dan Non OSS yang akan diterapkan oleh DPMPSTSP Provinsi Kalimantan Barat;
  - c. Pada tanggal 11 September 2023 dengan agenda Menindaklanjuti Hasil Evaluasi atas Kemudahan Berusaha Tahun 2023 dari BPKP Provinsi Kalimantan Barat dan Percepatan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kelautan dan Perikanan.

2. Sub Kegiatan Pemantauan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal dengan pagu awal Rp. 215.498.800,- yang kemudian mengalami perubahan menjadi Rp. 188.738.800,- dengan realisasi sebesar Rp. 186.095.679,- atau 98.60%. Kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan Triwulan IV 2023 antara lain :
  - Pada tanggal 28 Februari 2023 dengan agenda Membahas Tindaklanjut Laporan SKM Triwulan IV Tahun 2022 berupa Rapat Evaluasi SP dan SOP, Membahas Pelaksanaan SKM Triwulan I Tahun 2023 dan Membahas Kaderisasi dalam pelaksanaan penyusunan Laporan SKM Tahun 2023;
  - Pada tanggal 10 April 2023 dengan agenda Membahas Progres Tindak Lanjut Penyusunan SOP dan SP, Evaluasi SKM TW I dan Rencana Pelaksanaan SKM untuk Triwulan II ;
  - Pada tanggal 12 Juli 2023 dengan agenda Hasil Laporan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Triwulan II Tahun 2023;
  - Pada tanggal 11 Oktober 2023 dengan agenda Hasil Laporan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Triwulan III Tahun 2023;
  - Pada tanggal 12 Desember 2023 telah dilaksanakan rapat dengan agenda Hasil Laporan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Triwulan IV Tahun 2023.
3. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan dengan pagu awal Rp. 114.498.800,- yang kemudian mengalami perubahan menjadi Rp. 65.385.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 62.721.930,- atau 95.93 %. Kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan Triwulan IV 2023 antara lain :
  - Pada tanggal 14 Agustus 2023 dengan agenda Kunjungan Kerja Pemerintah Kota Singkawang dalam rangka Penerbitan Perizinan aktivitas Pertambangan dikaitkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Singkawang, serta pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap izin pertambangan yang ada di wilayah Kota Singkawang;
  - Pada tanggal 23 Oktober 2023 telah dilaksanakan rapat dengan agenda Kegiatan Pengawasan yang telah dilakukan oleh Tim Saber Pungli pada tanggal 19 Oktober 2023;
  - Pada tanggal 21 Desember 2023 telah dilaksanakan rapat dengan agenda Evaluasi Mekanisme Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat.

4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah dengan pagu awal Rp. 186.196.100,- yang kemudian mengalami perubahan menjadi Rp. 158.536.100,- dengan realisasi sebesar Rp. 155.342.573,- atau 97.99 %. Kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan Triwulan IV 2023 antara lain :
- Pada tanggal 7 Februari 2023 Agenda Sinkronisasi Regulasi adanya perubahan parameter persetujuan lingkungan sektor Perkebunan dan SDM di OSS-RBA;
  - Pada tanggal 26 Mei 2023 dengan agenda membahas persiapan akhir pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Mekanisme Perizinan Berusaha Sektor Pertambangan Mineral Non Logam dan Batuan Melalui OSS-RBA;
  - Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Provinsi pada Triwulan IV sudah terealisasi dengan terlaksananya kegiatan Sosialisasi dengan Tema “**Mekanisme Sistem Perizinan Berusaha Sektor Pertambangan Mineral Non Logam dan Batuan Melalui Sistem OSS-RBA**”, pada tanggal 30 Mei 2023;
  - Pada tanggal 27 Oktober 2023 telah dilaksanakan rapat dengan agenda evaluasi dan konsolidasi penyelenggaraan perizinan berusaha melalui Sistem OSS RBA;
  - Pada tanggal 11 Desember 2023 telah dilaksanakan rapat dengan agenda Membahas Rekomendasi PBPH PT. Global Hijau Nusantara dan Membahas Persetujuan DPLH (Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup) CV. Citra Mandiri Kalbar;
  - Pada tanggal 15 Desember 2023 telah dilaksanakan rapat dengan agenda menindaklanjuti Rapat Sinkronisasi Kebijakan Pemberian Rekomendasi untuk Perizinan Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang telah dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2023 di Ruang Rapat DPMPTSP Gedung Pelayanan Terpadu Lt. 2.

▪ **Perbandingan realisasi Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI					TARGET 2023
		2019	2020	2021	2022	2023	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Indeks Kepuasan Masyarakat	A	A	B	A	A	A

▪ **Perbandingan realisasi kinerja dengan target akhir RPJMD**

Berdasarkan Renstra DPMPTSP, target akhir untuk sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat dengan nilai A. Untuk pencapaian tahun 2023 sudah searah dengan target akhir RPJMD yang ditetapkan.

▪ **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran antara lain sebagai berikut :

1. Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM)/FO masih belum mencukupi untuk ditugaskan khusus untuk menangani perizinan.
2. Kompetensi SDM penyelenggara perizinan OSS berbasis resiko masih belum memadai.
3. Masih belum optimalnya pemahaman penyelenggara perizinan baik DPMPTSP maupun perangkat daerah teknis terkait penyelenggaraan perizinan berbasis resiko terutama untuk KBLI beririsan, regulasi yang rancu, dan persyaratan dasar.
4. Permasalahan lainnya adalah terkait dengan Online Single Submission. Ada berbagai tantangan didalam penyelenggaraan perizinan berbasis risiko. Tantangan dari sisi regulasi yang belum sinkron antara 1 Kementerian dengan Kementerian lainnya, sistem yang dikembangkan masih sering error, integrasi sistem OSS RBA dengan sistem K/L (untuk Persyaratan Dasar) masih belum dapat diterapkan secara maksimal termasuk bagaimana menjadikan OSS RBA sebagai sistem yang secara penuh diakui dan dimengerti oleh APH, Pemeriksa, dan Penilai yang selama ini menjadi mitra DPMPTSP.
5. Hal lain yang tidak kalah pentingnya yaitu DPMPTSP memerlukan perhatian dari pimpinan terkait kesejahteraan atau tunjangan khusus bagi penyelenggara perizinan karena beban dan resiko kerja yang dihadapi juga sangat tinggi.
6. Banyaknya penilaian kepada DPMPTSP, beban kepada DPMPTSP agar senantiasa memberikan pelayanan prima, memiliki integritas tinggi, namun keberpihakan kepada DPMPTSP berbanding terbalik dengan harapan yang sedemikian tinggi ditumpukan kepada DPMPTSP untuk menjadi garda terdepan dalam peningkatan investasi dan pelayanan publik. Hal ini antara lain dapat dilihat dari kurangnya perhatian dalam memikirkan kesejahteraan penyelenggara perizinan dan nonperizinan/DPMPTSP yang seyogyanya dapat diberikan Tunjangan/Insentif Khusus, anggaran yang dialokasikan kepada kepada DPMPTSP untuk menyekenggarakan berbagai program dan kegiatan

dalam rangka koordinasi dan pembinaan kepada kabupaten/kota belum dapat teragenda dan belum berjalan maksimal.

7. Kendala dalam proses pelayanan perizinan dan non perizinan :
  - a. Masih terdapat ketidaksinkronan antara regulasi dari 1 Kementerian dengan Kementerian lainnya, baik perizinan yang diproses melalui sistem OSS RBA maupun non perizinan dan/atau perizinan non OSS.
  - b. Informasi di dalam OSS RBA kadang membuat pelaku usaha bingung. Ada KBLI yang diinformasikan tidak ada persyaratan perizinan berusaha, namun ternyata mereka harus mengurus persyaratan dasar di awal sebelum mengajukan ke tahap perizinan berusaha (untuk Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi). Ada juga yang dicantumkan persyaratannya, misalnya SPPL, ternyata di Persyaratan Dasarnya ternyata harus UKI-UPL, atau sebaliknya
  - c. Begitu juga untuk jangka waktu pelayanan, kadang masih ada yang lewat dari SOP dikarenakan sistem yang kadang error sehingga tidak bisa diverifikasi by sistem tepat waktu.
  - d. Ada penambahan persyaratan yang terkadang dimasukkan pada saat Standar Pelayanan telah ditetapkan.
  - e. Penanganan pengaduan, akan difasilitasi dengan melihat tingkatan pengaduan yang disampaikan. Kendala terkait penanganan pengaduan yaitu ketika akan memfasilitasi/memediasi kedua belah pihak (pelapor dan terlapor), maka kadang sulit menghadirkan kedua belah pihak pada saat yang bersamaan.
8. Kendala dalam proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi :
  - a. Dasar Hukum : memerlukan waktu yang cukup lama apabila terjadi perubahan/ revisi Perda atau Pergub sebagai dasar hukum DPMPSTSP (harus difasilitasi oleh Pemerintah Pusat) dalam melaksanakan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan
  - b. Sarpras dan/atau fasilitas: terkadang jaringan bermasalah sehingga menjadi hambatan dalam pemberian pelayanan, dan sistem OSS RBA terkadang masih suka error atau maintenance dari pusat.
  - c. Kompetensi Pelaksana : masih minimnya diklat, bimtek, sosialisasi, workshop yang diikuti oleh pelaksana perizinan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensinya
  - d. Jumlah pelaksana : Masih sangat minim
  - e. Evaluasi Kinerja Pelaksana : terlalu banyak penilaian dan pemeriksaan yang ditujukan kepada DPMPSTSP

- f. Rentan terhadap APH : apabila ada produk perizinan yang bermasalah atau terindikasi bermasalah, maka DPMPSTP selalu menjadi pihak yang akan dimintai keterangan meskipun izin tersebut bukan diterbitkan oleh DPMPSTP
- g. Rentan dipersalahkan : Pelaksana perizinan dituntut untuk memberikan pelayanan prima, cepat, murah, dan mudah, serta sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP), namun ketika dipercepat dan dipermudah, dianggap mendapatkan sesuatu. Ketika penerbitan izinnya tidak sesuai jadwal dikarenakan ada hal-hal teknis yang masih perlu diverifikasi oleh PD Teknis, maka diduga mengharapkan sesuatu.
- h. Refocussing anggaran juga menjadi salah satu kendala bagi DPMPSTP untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan. Misalnya, dikarenakan harus memenuhi target refocussing yang telah ditetapkan oleh TAPD, maka ada beberapa kegiatan prioritas antara lain rapat koordinasi, pembinaan kepada kabupaten/kota, sosialisasi, bimtek, diklat, yang harus dianulir dan tidak dapat dilaksanakan sesuai perencanaan.

Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain:

- a) Untuk Dasar Hukum, selalu dilakukan koordinasi dengan Biro Hukum dalam rangka memonitor perkembangan revisi Perda dan Pergub.
- b) Berkoordinasi dengan Diskominfo dan Kementerian Investasi/BKPM terkait jaringan.
- c) Mengajukan perubahan/penambahan anggaran kepada Tim TAPD untuk pengalokasian anggaran untuk pemenuhan komponen standar pelayanan Bersurat ke BKD untuk penambahan SDM.
- d) Mengkoordinasikan dengan Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian Dalam Negeri dan BPSDM untuk lebih memperbanyak kegiatan yang berkaitan dengan Peningkatan Kapasitas/Diklat SDM bagi penyelenggara perizinan. Khusus untuk Kementerian Investasi /BKPM dimintakan penyelenggaraan Diklat/Bimtek agar diselenggarakan perwilayah sehingga satu daerah dapat mengusulkan peserta diklat dengan jumlah yang memadai.
- e) Menyurati BKD terkait usulan penambahan SDM di DPMPSTP Provinsi Kalbar.
- f) Melakukan koordinasi intensif dengan Perangkat Daerah terkait untuk membahas regulasi yang tidak sinkron atau saling mengunci.

- g) Menyurati dan/atau berkoordinasi langsung dengan K/L terkait atau Kementerian Investasi/BKPM sesuai tugasnya untuk menyampaikan permasalahan perizinan yang dihadapi terutama yang terintegrasi melalui sistem OSS RBA mengingat sistem tersebut “given” oleh Kementerian Investasi/ BKPM, begitu juga aturan sebagai acuan NSPK, adalah merupakan kewenangan pusat dalam penetapannya. Daerah hanya sebagai pelaksana dari kebijakan-kebijakan dimaksud.
- h) Penanganan pengaduan yang memerlukan mediasi DPMPTSP, akan difasilitasi secara bertahap, misalnya meminta informasi awal dari masing-masing pihak. Setelah mendapatkan masukan dari kedua belah pihak, maka akan diundang kedua belah pihak serta PD terkait untuk diajak berdiskusi, dan apabila dapat dilakukan penyelesaian dengan bersepakat pada saat itu juga, maka akan dibuat perjanjian/kesepakatan antara kedua belah pihak. Apabila masih memerlukan waktu, maka selanjutnya kedua belah pihak diminta untuk berkoordinasi “B” to “B”.

**Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan**

- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	%		
Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	9.319.829.000	8.875.063.835	95.23	95.63	4.77
<b>RATA-RATA</b>				<b>95.23</b>	<b>95.63</b>	<b>4.77</b>

Apabila dibandingkan antara rata-rata persentase realisasi anggaran sebesar 95.23% dengan realisasi capaian kinerja sebesar 95.63%, maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk sasaran Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan pada tahun anggaran 2023 diperoleh tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 4.77 pada tahun anggaran 2023.



▪ **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

1. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan pagu awal Rp. 75.396.300,- yang kemudian mengalami perubahan menjadi Rp. 60.896.300,- dengan realisasi sebesar Rp. 60.680.055,- atau 99.64 %. Kegiatan yang dilaksanakan pada sub kegiatan ini adalah melaksanakan penyusunan penetapan kinerja perangkat daerah yang dilakukan secara berjenjang dari pejabat struktural, jabatan fungsional tertentu dan pelaksana.
2. Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dengan pagu awal Rp. 27.802.200,- yang kemudian mengalami perubahan menjadi Rp. 16.452.200,- dengan realisasi sebesar Rp. 16.355.625,- atau 99.41 %.
3. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai dengan pagu awal Rp. 79.464.700,- yang kemudian mengalami perubahan menjadi Rp. 44.764.700,- dengan realisasi sebesar Rp. 44.3163983,- atau 99.00 %. Sub Kegiatan ini bertujuan untuk penyusunan analisa jabatan dan Pemberian Penghargaan kepada Pegawai Teladan di lingkungan DPMPSTSP Provinsi Kalimantan Barat. Penyusunan analisis jabatan bertujuan untuk memberikan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis berupa informasi jabatan dan uraian jabatan sebagai penjabaran dari Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada unit kerja.

Pemberian penghargaan Teladan dilakukan untuk memberikan apresiasi atas semangat pengabdian, integritas, dan komitmen dalam penyelenggaraan pelayanan publik bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat akan diberikan penghargaan kinerja kepada Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan Fungsional Tertentu yang memenuhi syarat.

Pemberian penghargaan kinerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Jabatan Fungsional Umum Dan Jabatan Fungsional pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan setiap 1 (satu) bulan sekali. Adapun bentuk penghargaan yang diberikan yaitu; a. piagam penghargaan; dan b. penghargaan lainnya.

4. Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD dengan pagu awal Rp. 45.311.900,- yang kemudian mengalami perubahan menjadi Rp. 31.811.900,- dengan realisasi sebesar Rp. 31.334.904,- atau 98.50 %. Dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi publik kepada masyarakat, PPID Pembantu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat senantiasa berupaya melaksanakan pembenahan internal untuk mengimplementasikan standar layanan informasi publik. Pembenahan yang dilaksanakan antara lain membangun *website/portal* resmi Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ([dpm-ptsp.kalbarprov.go.id](http://dpm-ptsp.kalbarprov.go.id)) sebagai sarana/media informasi dan komunikasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada masyarakat dan hubungan interaktif ke lembaga/instansi lain. Kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik meliputi proses yang dimulai dari pengumpulan data, bahan informasi, *draft* jawaban informasi publik, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan serta pelayanan Informasi publik dan terakhir hingga ke proses sengketa informasi publik yang keseluruhannya dilaksanakan oleh PPID Provinsi maupun PPID pada perangkat daerah.

▪ **Perbandingan realisasi Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI					TARGET 2023
		2019	2020	2021	2022	2023	
Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-	A	A	A	A

▪ **Perbandingan realisasi kinerja dengan target akhir RPJMD**

Target akhir untuk sasaran strategis Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan yaitu memperoleh Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai A. Untuk pencapaian tahun 2023 sudah sesuai dengan target akhir RPJMD yang ditetapkan.

▪ **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran antara lain sebagai berikut:

- 1) Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Renja, Keuangan dan Aset masih belum mencukupi.
- 2) Kompetensi SDM Renja, Keuangan dan Aset masih belum memadai.
- 3) Masih belum optimalnya realisasi capaian dikarenakan pengesahan DPA yang tidak sesuai dengan jadwal belanja dan adanya pemotongan anggaran dan pergeseran dan perubahan DPA.
- 4) Permasalahan lainnya adalah terkait dengan Aplikasi keuangan (CMS) yang terkandung terkendala saat bertransaksi dengan rekening diluar Bank Kalbar serta aplikasi baru dalam belanja melalui E-Purchasing yang masih baru dan pihak penyedia yang belum lengkap dalam kesedian barang.
- 5) Masih banyak asset yang belum tertata secara rapi dalam mutasi barang.

Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain:

- a) Berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah dalam rangka menambah jumlah personal yang handal.
- b) Memaksimalkan capaian belanja di awal Tahun.
- c) Berkordinasi dengan bagian Keuangan BKAD Prov. Kalbar dan Perbankan terkait rekening di luar Bank Kalbar agar lebih mudah dalam pencairan.

## B. REALISASI ANGGARAN

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat mendapatkan pagu anggaran murni sebesar Rp.12.976.679.820,-. Pada penyempurnaan pergeseran anggaran Tahun 2023 menjadi Rp. 12.789.420.137,- berkurang anggaran sebesar Rp.187.259.683,-. Kemudian pada perubahan anggaran Tahun 2023 menjadi Rp.12.019.968.846,- berkurang sebesar Rp. 769.451.291. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat mencapai realisasi anggaran sebesar Rp. 11.472.645.554,- atau 95.45%. Berikut rincian anggaran belanja dan realisasi belanja DPMPSTP Prov. Kalbar tahun anggaran 2023 yang mendukung pelaksanaan sasaran strategis tersebut di atas :

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9.319.829.000	8.875.063.835	95,23
2.18.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	142.002.700	141.106.337	99,37
2.18.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.922.700	14.881.750	99,73
2.18.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.793.200	6.650.900	97,91
2.18.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.568.700	6.490.275	98,81
2.18.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.751.800	6.544.400	96,93
2.18.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	6.611.300	6.495.032	98,24
2.18.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	39.458.700	39.363.925	99,76
2.18.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.896.300	60.680.055	99,64
2.18.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.484.943.745	7.090.613.930	94,73
2.18.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.129.985.845	6.755.891.865	94,75
2.18.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	273.600.000	253.650.000	92,71
2.18.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	45.868.900	45.800.053	99,85
2.18.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	16.452.200	16.355.625	99,41

2.18.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	19.036.800	18.916.387	99,37
2.18.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	13.659.900	13.642.622	99,87
2.18.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	13.659.900	13.642.622	99,87
2.18.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	244.394.800	233.180.099	95,41
2.18.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	84.000.000	76.342.500	90,88
2.18.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	13.630.100	13.222.060	97,01
2.18.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12.000.000	11.336.789	94,47
2.18.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	44.764.700	44.316.983	99,00
2.18.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	70.000.000	69.935.234	99,91
2.18.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20.000.000	18.026.533	90,13
2.18.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	361.887.135	341.307.593	94,31
2.18.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.902.800	9.163.050	92,53
2.18.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	47.663.900	46.965.127	98,53
2.18.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	36.166.900	34.819.870	96,28
2.18.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.700.000	14.394.750	81,33
2.18.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	57.289.835	51.042.393	89,10
2.18.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.000.000	9.225.000	76,88
2.18.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	24.000.000	20.092.750	83,72
2.18.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	112.900.000	112.131.721	99,32
2.18.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12.451.800	12.138.028	97,48
2.18.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	31.811.900	31.334.904	98,50
2.18.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	144.683.083	142.737.050	98,65
2.18.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	28.174.000	27.947.000	99,19
2.18.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	116.509.083	114.790.050	98,52
2.18.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	681.586.437	674.843.257	99,01
2.18.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000	0	0,00
2.18.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	28.740.317	28.740.317	100,00
2.18.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	652.346.120	646.102.940	99,04
2.18.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	246.671.200	237.632.947	96,34
2.18.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	88.827.200	79.939.480	89,99

2.18.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	73.194.000	73.113.467	99,89
2.18.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	74.650.000	74.603.000	99,94
2.18.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	0	0
2.18.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000	9.977.000	99,77
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	459.589.900	451.916.514	98,33
2.18.02.1.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	330.447.300	329.434.784	99,69
2.18.02.1.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	290.783.000	290.558.699	99,92
2.18.02.1.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	39.664.300	38.876.085	98,01
2.18.02.1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	129.142.600	122.481.730	94,84
2.18.02.1.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	72.042.000	65.421.920	90,81
2.18.02.1.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	57.100.600	57.059.810	99,93
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	541.618.600	537.331.388	99,21
2.18.03.1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	541.618.600	537.331.388	99,21
2.18.03.1.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	541.618.600	537.331.388	99,21
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	628.831.748	616.273.860	98,00
2.18.04.1.02	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	628.831.748	616.273.860	98,00
2.18.04.1.02.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	216.171.348	212.113.678	98,12
2.18.04.1.02.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	188.738.800	186.095.679	98,60
2.18.04.1.02.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	65.385.500	62.721.930	95,93
2.18.04.1.02.04	Koordinasidan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	158.536.100	155.342.573	97,99
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	1.000.456.498	940.157.709	93,97
2.18.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	1.000.456.498	940.157.709	93,97
2.18.05.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	69.329.898	62.096.731	89,57
2.18.05.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	626.571.900	594.972.684	94,96

2.18.05.1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	304.554.700	283.088.294	92,95
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	69.643.100	51.902.248	74,53
2.18.06.1.01	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	69.643.100	51.902.248	74,53
2.18.06.1.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	69.643.100	51.902.248	74,53

\*Laporan Realisasi Fisik DPMPSTSP Prov. Kalbar T.A 2023

## BAB IV PENUTUP

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat tidak terlepas dari dukungan dan peran serta seluruh ASN di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat yang secara sinergis saling membantu serta adanya komitmen dan dorongan dari Pimpinan untuk senantiasa memberikan motivasi kepada pegawai dan seluruh komponen yang terkait dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan bersama.

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat, perlu disampaikan beberapa hal sebagai langkah penting sebagai upaya pemecahan masalah yang akan dijadikan dasar dalam memperbaiki kebijakan dan program yang dapat memacu pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat, yaitu sebagai berikut:

- a) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat memberikan dukungan terhadap percepatan berusaha kepada pelaku UMKM melalui Program PERIUK (Pelayanan Responsif Izin Usaha Mikro Kecil).
- b) Meningkatkan koordinasi dengan Kab./Kota dan instansi terkait dalam rangka mendorong tersedianya data-data tentang potensi dan unggulan daerah yang *up to date* dari masing-masing Kab/Kota yang dilakukan melalui kajian-kajian untuk bahan promosi dalam menarik minat investor.
- c) Perumusan kebijakan daerah yang tepat dalam mendukung pengembangan iklim penanaman modal dan merumuskan kebijakan daerah disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah.
- d) Memberikan pemberitahuan secara tertulis/surat elektronik kepada pelaku usaha mengenai kewajiban penyampaian LKPM setiap triwulan dan mengintensifkan program pendampingan bagi perusahaan yang memerlukan bimbingan langsung di lokasi proyek, kantor cabang dan tatap muka/offline terkait dengan penyusunan LKPM terhadap pelaku usaha yang telah mendapatkan Perizinan Berusaha.
- e) Melakukan pembinaan secara rutin melalui Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Tata cara Pengendalian Penanaman Modal Peraturan Kepala BKPM RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
- f) Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat berupaya untuk terus melaksanakan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi kemudahan berusaha bagi pelaku usaha.

- g) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota perlu mengintensifkan pengendalian penanaman modal, sehingga realisasi proyek dapat lebih ditingkatkan.
- h) Mengintensifkan program pendampingan bagi perusahaan yang memerlukan bimbingan langsung di lapangan terkait dengan penyusunan LKPM.
- i) Mengembangkan inovasi penyelenggaraan PTSP untuk meningkatkan pelayanan prima dengan membangun sistem pelayanan perizinan dan nonperizinan berbasis teknologi informasi dalam mendorong perekonomian daerah.

Demikianlah Laporan Kinerja Tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat ini disusun dengan harapan Laporan Kinerja Tahunan ini dapat memberikan informasi tentang kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023, untuk selanjutnya sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Pontianak, Januari 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Kalimantan Barat,



Hendra, S.Sos  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19680925 198908 1 001



Lampiran : Formulir Pengukuran Kinerja

### FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Kalimantan Barat

Tahun Anggaran : 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya Nilai Investasi	Jumlah Nilai Investasi	21,52 T	26,90 T	124.99%
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Indeks Kepuasan Masyarakat	A	A	88.55%
3.	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	A	81.20%

Jumlah Total Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2023 : Rp. 12.019.968.846

Jumlah Realisasi Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2023 : Rp. 11.472.645.554

Pontianak, Januari 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Kalimantan Barat,



  
Hendra, S.Sos  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19680925 198908 1 001